PEMANFAATAN DATA E-KTP DALAM PROSES VALIDASI PESERTA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

Abd Hamid Abdulloh

LPTQ Jawa Timur dan STIT Diponegoro Nganjuk

abdbamid1952@yahoo.com

Abstract

Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) in Indonesia can be considered as a religious activity carried out regularly, with large amount of government's funding. MTQ cannot be separated from the social dimension. Therefore, competition among regions to be the main champion is an inevitable matter. This has implications on the authenticity of the participants in terms of data validation process. This article has been written based on field and literature researches. It focuses on the problem of minimizing and eradicating the deficiencies and irregularities, which might occur during the MTQ activities, related to a number of crucial issues such as age of the participants, sex, fingerprints, and address of the participants. The result of the study indicates that in order to validate the data, the participants should use the e-ID card technology. Through the card reader and access to the *Dispenduk's* data warehouse the authenticity of the data can be authenticated

Keywords: e-ID card, technology, Musabaqoh Tilawatil Quran

Abstrak

Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) di Indonesia dapat dianggap sebagai kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin, dengan dana pemerintah cukup besar. MTQ tidak lepas dari dimensi sosial. Karenanya, terjadi persaingan antar daerah untuk meraih juara umum. Ini mempunyai implikasi pada keaslian peserta dalam proses validasi data. Penelitian berdasarkan riset pustaka dan lapangan ini mempunyai fokus pada masalah bagaimana meminimalisir, bahkan menghilangkan kekurangan dan kecurangan yang terjadi pada kegiatan MTQ terkait dengan usia peserta jenis kelamin, sidik jari, dan alamat peserta. Hasil penelitian menunjukkan, untuk memvalidasi data, peserta dapat menggunakan teknologi e-KTP. Melalui *card reader* dan akses ke *dispenduk data warehouse*, maka keaslian data dapat divalidasi.

Kata kunci: e-KTP, Teknologi, Musabaqoh Tilawatil Quran

Pendahuluan

Belakangan ini masyarakat disugahi banyak macam audisi bakat vokal maupun kesenian. Pencarian bakat seni menjadi dambaan ribuan orang, untuk sekedar mencari peruntungan dan untuk menggapai popularitas melalui kontes kesenian tersebut.

Berbeda halnya yang terjadi pada MTQ. MTQ sebagai ajang perlombaan seni Qur'an pada awal pelaksanaan di Makasar tahun 1968, sesungguhnya ia berjalan dengan semangat syiar agama Islam dan semangat kekeluargaan. MTQ Nasional pertama kali itu mencerminkan bagaimana antar peserta antar daerah dan penduduk setempat menjalin kebersamaan. Nilai-nilai persatuan, kebersamaan dan kejujuran sangat dijunjung. Antar peserta dan antar daerah bersungguh-sungguh berlomba, bukan atas dasar persaingan dan gengsi daerah (Junaidi, 2011: 109).

Namun seiring berjalannya masa, mulailah era persaingan antar daerah. Keinginan suatu daerah untuk meraih juara mulai dilakukan dengan cara kurang sehat. Yang paling lazim dilakukan adalah dengan mengubah data umur atau daerah asal peserta. Terkadang sampai mengubah nama dan tanggal lahir dengan cara membuat akta lahir atau KTP baru. Keinginan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Provinsi) untuk meraih juara umum dapat menyebabkan terjadinya manipulasi data peserta lomba pada setiap perhelatan MTQ sebab ambisi atau ego daerah tersebut.

Makna Seni Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Al-Qur'an (Qardawi, 2004: 1) berisi tentang ajaran agama, pengetahuan, serta sastra dan seni sekaligus. Ia memenuhi hajat ruhani, memuaskan logika, membangun jiwa, memberkan kenikmatan rasa dan mengasah lisan. Seni al-Qur'an memiliki sasaran dan fungsi. Ia bukan sesuatu yang liar. Sebaliknya, ia adalah karya yang semestinya sarat kandungan pesan dan komitmen pada kebenaran.

Para sastrawan Arab telah menjelaskan berbagai aspek kemukjizatan yang menyangkut keindahan al-Qur'an, sejak Abdul Qadir, Rafi'i sampai generasi sayyid Qutb dan Bintu Syathi. Pembaca Qur'an dituntut untuk menggabungkan keindahan suara dan akurasi *makhorijul huruf* dengan irama tilawah secara sekaligus. Allah SWT berfirman, “..dan bacalah al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.” (QS. 74: 4) Rasulullah juga bersabda,

زَيُّوْا أَسْوَاتِكُمْ بِالْقُرْآنِ

“*Hiasilah suaramu dengan membaca Al-Qur'an.*” (HR Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Darimi).

Dalam redaksi lain,

فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا

“*Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan al-Qur'an semakin bagus.*” (HR. Darimi dan Hakim)

Rasulullah juga bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ

“*Bukanlah golongan kami, orang yang tidak melagukan bacaan al-Qur'an.*” (HR. Bukhari)

Sedangkan seni tulis al-Qur'an (kaligrafi) dilukiskan sebagai kecantikan rasa, duta akal, nasihat pikiran, senjata pengetahuan, *lisan al-yadd*. Al-Qalqasyandi mengumpamakannya sebagai ibarat ruh di dalam tubuh (Sirojuddin AR, 1996: 8). Seni khat selain dapat mendorong minat terhadap seni mushaf, ia sangat bermanfaat dalam membentuk pribadi yang sabar, disiplin, kreatif, waspada, terampil, dan bersih. Seni tulis ini dilandasi oleh perintah membaca dan menulis di dalam al-Qur'an (QS. 96: 1-5) dan (QS. 68: 1).

Setidaknya menurut Haryono (2002: 203) ada dua macam misi yang hendak diwujudkan oleh umat Islam berkaitan dengan fenomena Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). *Pertama*, syi'ar Islam. Walaupun niat luhur dibalik kegiatan

yang semarak ini semata-mata mencari ridlo Allah, musabaqoh ini tidak lepas dari dimensi sosialnya yaitu sebagai sebuah eksibisi. *Kedua*, tujuan internal. Dengan menyelenggarakan perlombaan rutin yang mempertandingkan qori'-qori'ah antar wilayah dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat internasional, diharapkan agar masing-masing pemegang kebijakan di semua wilayah mendorong dan mendukung aktivitas-aktivitas pembelajaran al-Qur'an.

Dari sudut pandang etimologi (Anna M. Gade, 2004:3), *Musabaqah* adalah *isim mashdar* yang berarti perlombaan. *Tilawah* memiliki arti hampir mirip dengan kosakata *qiro'ah*. Dalam Qur'an, kata *qiro'ah* disebutkan pada QS 17:14, QS 16:98, QS 18:27, QS 8:2.

Dengan demikian bisa disimpulkan MTQ (LPTQ Tingkat Nasional, 2010:3-4) merupakan perlombaan seni Islami yang mengejawantahkan pesan-pesan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dengan cara: membaca (*tilawah* dan *qira'at*), menghafal (*hifdz*), menulis (*khat*), memahami (*fahm*), menafsirkan (tafsir) dan menyampaikan (*syarh* dan makalah) tuntunan al-Qur'an. Karena dengan demikian MTQ dapat mencapai tujuannya yaitu untuk mendekatkan jiwa umat Islam kepada kitab suci dan meningkatkan semangat membaca, mempelajari serta mengamalkan al-Qur'an.

Hukum perlombaan dalam MTQ mengikuti konsep ushul fiqh: *maslahah mursalah*. Pemenuhan kebutuhan umat Islam dalam hal seni budaya ini juga relevan dengan konsep *sad dzari'ah*, untuk mengimbangi seni budaya asing. Dalam MTQ, para peserta diharapkan tidak meniatkan membaca al-Qur'an untuk mengadu nasib sehingga menghilangkan rasa ikhlas (niat karena *li i'la kalimatil Alah*). *Dzauq* (perasaan rindu dan rendah diri di hadapan Allah) perlu diasah sehingga baik pembaca, pendengar dan pendidik dapat menyentuh hati untuk mengagungkan kalam ilahi tersebut. Sejarah mencatat, hati Jubair bin Muth'im serasa terguncang ketika mendengar Rasulullah membaca salah satu ayat Qur'an (As-Suyuti, tt:314).

Kepekaan terhadap makna isi al-Qur'an lebih digunakan sebagai instrumen mengasah diri untuk memiliki *dzauq* (perasaan) ilahiyah. Karena hanya dengan *dzauq* ilahiyah inilah, para peserta MTQ diharapkan memiliki rasa *khauf* pada Allah, sebagai pondasi dasar membangun mental dan moral yang Islami.

MTQ sudah tercatat lama dalam sejarah Indonesia. Ia sudah sejak dahulu dilombakan baik di pelosok perkampungan, tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan nasional. Biasanya diadakan pada hari-hari besar Islam. Sejak MTQ Nasional pertama di Makasar yang hanya diikuti untuk golongan dewasa, kemudian berkembang menjadi 5 Cabang kegiatan pada MTQ ke 13 di Padang. Cabang-cabang tersebut diantaranya adalah: MTQ (*tilawah*), MHQ (hafalan), MFQ (*fahmil Qur'an*), MSQ (*syarh*), MKQ (*khat*). Masing-masing cabang terdiri dari golongan anak, remaja, dan dewasa. Menariknya, MTQ bahkan mengakomodir qori' tunanetra dan wanita (Dahlan, 1997:90).

Peningkatan cabang perlombaan sekaligus problematika orisinitas data peserta merupakan sebuah tantangan baru guna memperbaiki kualitas penyelenggaraan musabaqah yang bertumpu pada aturan-aturan ketatalaksanaan dan kegiatan perhakiman. Tugas dalam penyelenggaraan musabaqah sejak persiapan dan ketika pelaksanaan musabaqah harus dipersiapkan dengan baik sehingga mutu hasil musabaqah benar-benar objektif, tepat, teliti dan semakin meningkatkan kualitasnya.

Pemanfaatan IT untuk MTQ

Dalam rangka transparansi dan modernisasi sistem perhakiman, pendaftaran, penilaian, pengumuman hasil musabaqah dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Information Technology* (IT). Hal ini adalah merupakan jawaban atas persoalan orisinalitas data peserta MTQ yang kerap terjadi dan menjadi masalah besar bagi panitia. Selama ini, data-data validasi yang disertakan untuk dokumen pengabsahan pendaf-

taran peserta masih mengandalkan pada fotocopy ijazah, akte kelahiran, KTP sebagai data primernya. Sebelum adanya e-KTP, dokumen-dokumen para kafilah masih ada yang ditemukan dimanipulasi dengan alat scanner dan aplikasi pemani-pulasi gambar. Sehingga peserta tersebut dapat diloloskan oleh pihak validator.

Dalam era e-KTP ini, dispenduk mempunyai program yang brilian. Berdasarkan amanah UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, utamanya setelah penyelenggaraan administrasi kependudukan bergulir sampai tahun 2012, maka pada tahun 2013 mulai dibuka akses data penduduk berdasarkan NIK kepada instansi pemerintah dan lembaga negara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Data penduduk digunakan untuk berbagai kepentingan pembangunan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data yang bersifat privasi. Dalam hal akses data dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilandasi dengan UU, Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk berbagi data NIK.

Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi. NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format *hhbbtt* (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. Sebagai contoh, misalkan seorang perempuan lahir di Kota Bandung tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah: 10 50

24 570890 0001. Apabila ada orang lain (perempuan) dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 10 50 24 570890 0002. Apabila ada orang lain (laki-laki) dengan domisili dan tanggal lahir yang sama mendaftar, maka NIK-nya adalah 10 50 24 170890 0001

Pemanfaatan Data Kependudukan

Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu.

Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain.

Secara khusus UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Satu dekade terakhir Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melaku-

kan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Database penduduk tersebut disimpan dalam data center yang terletak di kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Taman Makan Pahlawan No. 17 Jakarta Selatan, dan di Pulau Batam.

Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi:

1. *Database* yang merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data (pasal 1 point 29 PP No. 37 Tahun 2007).
2. *Data Kependudukan*, yaitu data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data perseorangan menurut UU No. 24 Tahun 2013, pasal 58 ayat 2, meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah (non muslim); nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta

perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai (non muslim); tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

3. *Data agregat* yang merupakan kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013). Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana (pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1). Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk:

1. *Pelayanan publik* antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.

2. *Perencanaan pembangunan* yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

3. *Penegakan hukum* dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Ketentuan pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain :

1. Pasal 94 menyebutkan bahwa setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 77 dapat pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Pasal 95 B menyebutkan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi dan melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam pasal 79A dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.0000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Pasal 96 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sesuai dengan bunyi pasal 5 huruf f dan g akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dengan diterapkannya sanksi pidana tersebut diharapkan petugas dan pengguna data kependudukan tidak berwenang menyebarkan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 182A tahun 1988 dan nomer 48 tahun 1988 Kementerian Agama bekerjasama dengan Kemen-

terian Dalam Negeri secara bersama mengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ). LPTQ merupakan lembaga yang berperan melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, perhakiman, publikasi, usaha, dana, penelitian serta pengembangan dan pembinaan kepada umat Islam dalam bidang tilawah al-Qur'an. Dimana lembaga ini terbentuk sebagai jalinan kerjasama antara berbagai stakeholder baik lembaga pemerintahan maupun lembaga keagamaan. Pemanfaatan data kependudukan lembaga negara, kementerian/- lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia seperti LPTQ ini akan bermanfaat membantu pelaksanaan MTQ menjadi lebih baik. Sebab data peserta MTQ yang akan digunakan adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013).

Validasi Peserta MTQ

Dalam ilmu komputer, validasi data adalah proses untuk memastikan bahwa program beroperasi pada data yang bersih, benar dan berguna. Menggunakan rutinitas, sering disebut "aturan validasi" atau "cek rutinitas", yang memeriksa kebenaran, kebermaknaan, dan keamanan data yang dimasukkan ke sistem. Sebuah rumus aturan dapat diimplementasikan melalui fasilitas otomatis dari kamus data, atau dengan masuknya data secara eksplisit pada program aplikasi validasi logika.

Untuk aplikasi bisnis, validasi data dapat didefinisikan melalui deklarasi integritas aturan data, atau prosedur berbasis aturan bisnis. Data yang tidak sesuai dengan aturan-aturan ini akan berdampak negatif pada pelaksanaan proses bisnis. Oleh karena itu, validasi data harus dimulai dengan definisi proses bisnis dan seperangkat aturan bisnis dalam proses ini. Validasi data yang salah dapat menyebabkan kerusakan data atau kerentanan keamanan. Oleh karena itu dibutuhkan pengecekan validasi supaya data menjadi valid,

masuk akal, wajar, dan aman sebelum mereka diproses (http://en.wikipedia.org/wiki/Data_validation).

Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara memastikan setiap bahan, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam prosedur dan pengawasan sehingga akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti bahwa pengukuran itu dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan yang lain.

Tujuan validasi (Azwar, 1986:38) adalah mengidentifikasi parameter proses yang kritis, menetapkan batas toleransi yang dapat diterima dari masing-masing parameter proses yang kritis, dan memberi cara/metode pengawasan terhadap parameter proses yang kritis. Dalam hal Musabaqah Tilawatil Qur'an, peserta MTQ adalah seorang/regu dari perwakilan saerah yang telah berdomisili di daerah yang diwakilinya sekurang-kurangnya satu tahun dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Peserta MTQ adalah yang memenuhi persyaratan umur sebagai berikut.

Tabel 1: Syarat umur peserta MTQ

Cabang/Golongan	Umur Maksimal
Tartil Qur'an	10 tahun 11 bulan 29
Anak-anak	13 tahun 11 bulan 29
Remaja	19 tahun 11 bulan 29
Dewasa	40 tahun 11 bulan 29
Cacat Netra	44 tahun 11 bulan 29
Qira'at Sab'ah Mujawwad	40 tahun 11 bulan 29
Qira'at Sab'ah Murattal	19 tahun 11 bulan 29
1 Juz Tilawah	12 tahun 11 bulan 29
5 Juz Tilawah	14 tahun 11 bulan 29
10 Juz Tilawah	16 tahun 11 bulan 29

20 Juz Tilawah	18 tahun 11 bulan 29
30 Juz Tilawah	20 tahun 11 bulan 29
Tafsir Bahasa Arab	20 tahun 11 bulan 29
Tafsir Bahasa Indonesia	29 tahun 11 bulan 29
Tafsir Bahasa Inggris	29 tahun 11 bulan 29
MFQ (<i>fahm</i>) Tsanawiyah	18 tahun 11 bulan 29
MFQ (<i>fahm</i>) Ibtidaiyah	12 tahun 11 bulan 29
MSQ (syarh)	18 tahun 11 bulan 29
MSQ (syarh) S1	23 tahun 11 bulan 29
MKQ (khot)	35 tahun 11 bulan 29
M2IQ (Makalah Ilmiah)	24 tahun 11 bulan 29

Peserta Wajib hadir pada saat pendaftaran ulang dan menandatangani pernyataan kesediaan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku bila pernyataan yang diberikannya tidak benar. Apabila ditemukan dan dapat dibuktikan adanya pemalsuan identitas peserta, maka akan didiskualifikasi dan dilarang mengikuti MTQ 3 tahun berikutnya secara berurutan. Dewan pengawas MTQ melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bila terjadi pelanggaran ketentuan peserta dengan cara memanggil official dan atau pesertanya untuk dilaporkan kepada ketua umum LPTQ untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(LPTQ Tingkat Nasional, 2010: 16-25).

Implementasi validasi peserta MTQ dengan menggunakan e-KTP dapat dimanfaatkan untuk mengoreksi 2 hal: *pertama*, validasi umur maksimal peserta pada cabang tertentu, *kedua*, asal kota/tempat tinggal dari peserta. Proses validasi ini dilakukan ketika pendaftaran MTQ dan ketika peserta akan tampil di mimbar. Selama ini peserta hanya diberi ID Card yang berisi nomor dan foto peserta. Kerawanan ada juga pada ketidaksesuaian antara data dan foto peserta. Antisipasi untuk mencegah celah kecurangan data peserta juga dapat dicegah melalui card reader e-KTP dan *fingerprint* yang dapat merekam sidik jari peserta yang terdaftar.

Dari hasil pendaftaran peserta tersebut, panitia lantas mengumumkan nama-nama calon peserta MTQ dan kemudian disahkan/ditetapkan oleh panitia pada saat pertemuan teknis (*technical meeting*) sampai dilakukan pengesahan menjelang sidang pleno terakhir dewan hakim. Pada saat pelaksanaan musabaqah, peserta tampil dan mengikuti penentuan giliran pada hari yang ditentukan 30 menit sebelum acara dimulai. Lalu diarahkan untuk menyidik jarinya guna verifikasi identitas peserta. Dengan demikian, data peserta dapat tervalidasi dengan tepat.

Penutup

Sudah lumrah, setiap peserta yang mengikuti salah satu cabang lomba dalam MTQ memiliki harapan untuk menjadi juara. Banyak hal dilakukan demi harapan besar itu. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) untuk mengelola problematika-problematika dalam lomba MTQ; diantaranya pemilihan anggota dewan hakim perwakilan tiap provinsi dengan melihat rekam jejak masing-masing, sampai penggunaan IT (informasi teknologi) dalam MTQ, bahkan penilaian (interval) selisih 2 angka antara dewan hakim satu dengan dewan hakim lain.

Dengan penggunaan sistem IT dalam MTQ, diharapkan lomba dapat dilaksanakan secara lebih jujur, objektif dan sesuai dengan ruh al-Qur'an. Bagaimanapun peserta MTQ adalah penyampai firman Allah, maka mereka harus mengawali pengamalan al-Qur'an pada dirinya sendiri agar berperilaku dan berpedoman sesuai dengan kesucian al-Qur'an.

Daftar Rujukan

- Al-Suyuti, Jalal al-Din. 1979. *al-Itqan fi al-Ulum al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz I.
- AR, D Sirojuddin. 1996. *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa: Konsep Estetika*, Jakarta, Bina Rena Pariwisata.
- Azwar, Saifuddin. 1986. *Reliabilitas dan Validitas: Interpretasi dan Komputasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve.

- Gade, Anna M. 2004. *Perfection Makes Practice: Learning, Emotion, and the Recited Qur'an in Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Haryono, Yudhie R. 2002. *Bahasa Politik Al Quran: Mencurigai Makna Tersembunyi Di Balik Teks*, Bekasi: Gugus Press.
- Institut Ilmu Al Qur'an. 2002. *Aku dan IIQ, Peran Dan Kiprah Wanita IIQ*, Jakarta.
- Junaidi, Edi. 2011. *Revitalisasi Peran LPTQ: Sebuah Catatan Kritis*, Jakarta, Jurnal Bimas Islam Vol 4 no 1.
- LPTQ Tingkat Nasional. 2010. *Pedoman Musabaqah Al-Qur'an Tahun 2010*, Jakarta.
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Islam Agama Peradaban (Terj)*, Solo, Era Intermedia.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
- http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan (terakhir diakses 25 Maret 2014).
- http://en.wikipedia.org/wiki/Data_validation (terakhir diakses 25 Maret 2014).